



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020-2024**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyempurnaan/ penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020-2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rewiu Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Hal-hal yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.04 TAHUN 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021
 TANGGAL : 07 Mei 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum		
	1 Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk	
	2 Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	Jumlah pasal yang dikabulkan dalam pengujian di MK dibagi Total jumlah pasal dalam Undang-Undang Prakarsa Pemerintah yang sudah putus dikali 100 %	
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional		BPHN
SP12-01	Tenwujudnya Pembinaan Hukum		
	1 Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	
	2 Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	
	3 Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	
	4 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
	5 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional		
SK 1	Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional		
	1 Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	
	2 Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		
SK 2	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional		
	1 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	
	2 Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		
SK 3	Meningkatnya kualitas desa sadar hukum, penyuluhan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan bantuan hukum untuk orang/kelompok masyarakat miskin		
	1 Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah	
	2 Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	
	3 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	
	4 Jumlah JFT Penyuluhan Hukum yang terbentuk	Jumlah JFT Penyuluhan Hukum yang terbentuk	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	5 Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk	
	6 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional		
SK 4	Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan penyiapan naskah akademik		
	1 Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah	
	2 Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan	
	3 Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
SK 5	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional		
	1 Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	
	2 Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan	Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan	
	3 Jumlah layanan data dan informasi BPHN	Jumlah layanan data dan informasi BPHN	
	4 Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP	Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP	
	5 Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	
	6 Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN	Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN	
	7 Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan	Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan	
	8 Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan	
	9 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		
SK 6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah		
	1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	
	2 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	
	3 Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	
	4 Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	
	5 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	
	6 Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	
PD4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementrian Hukum dan HAM		Balilbang Hukum dan HAM
SPD4-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset		
	1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
1619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		
SK 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		
	1 Presentase Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{pegawai yang mendapat layanan dukungan manajemen}}{\sum \text{pegawai seluruhnya}} \times 100\%$	
	2 Presentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		$\frac{\sum \text{capaian kinerja tahun sekarang (n)} - \sum \text{capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		
SK 2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah		
1	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan	
5854	Penelitian dan Pengembangan Hukum		
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
1	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
5855	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia		
SK 5	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
1	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
5856	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan		
SK 6	Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
1	Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
5857	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
SK 7	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
1	Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	
SK 8	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal	
SK 9	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia		
1	Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	
P08	Program Pembentukan Hukum		Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
SP08-01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas		
1	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target penyusunan RPUU dikalikan 100 %	
2	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
3	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1596	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
SK 1	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi			
	1	Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kemenkumham	Jumlah karwil yang difasilitasi perancangan peraturan daerah	
	2	Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang perat	
	3	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
	4	Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan	
1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan			
SK 2	Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung dan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi			
	1	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung	jumlah tersusunnya keterangan presiden dan jawaban termohon dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	
	2	Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	jumlah pendampingan persidangan di MK dibagi dengan permohonan pendampingan dikalikan 100 %	
SK 3	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi			
	1	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi dibagi dengan jumlah permohonan dikalikan 100 %	
1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan			
SK 4	Rancangan Peraturan perundang-undangan			
	1	Jumlah rancangan undang-undang yang disusun sesuai dengan perencanaan	jumlah RUU yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	2	Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibahas di DPR	Jumlah RUU prakarsa Kemenkumham yang dibahas di DPR dalam satu tahun anggaran	
	3	Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR	jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR RI	
	4	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun sesuai dengan perencanaan	jumlah RPP yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	5	Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	jumlah konsepsi RPUU yang selesai disusun	
	6	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang disusun sesuai dengan perencanaan	jumlah Rpepres yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	7	Jumlah rancangan peraturan menteri hukum dan HAM yang diselaraskan sesuai dengan perencanaan	jumlah Rpermen yang selesai penyelebaran dalam satu tahun anggaran	
1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan			
SK 5	Peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan			
	1	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dibagi dengan permohonan pengundangan dikalikan 100%	
	2	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan	Jumlah jurnal legislasi nasional yang diterbitkan	
	3	Jumlah peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam website resmi Ditjen PP	
	4	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan	
1603	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP			
SK 6	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan			
	1	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	
	2	Jumlah layanan internal (overhead)	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	3 Jumlah bulan layanan perkantoran	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah		
SK 7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah		
	1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi PUU	
SK 8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		
	1 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra		
SK 9	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra		
	1 Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang polhukamkesra yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang polhukamkesra dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
5852	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian		
SK 10	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian		
	1 Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang perekonomian dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat		
	1 Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM	
	2 Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
	3 Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali 100%	
P07	Program Administrasi Hukum Umum		Ditjen AHU
SP07-01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum		
	1 Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Jumlah layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%	
1573	Administrasi Hukum Perdata		
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum		
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang masuk pada Direktorat Perdata dikali 100%	
1574	Administrasi Hukum Pidana		
SK 4	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum		
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum pidana yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Pidana dikali 100%	
1575	Administrasi Hukum Tata Negara		
SK 6	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum		
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Tata Negara dikali 100%	
1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU		
SK 9	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Administrasi Hukum Umum yang responsif, efektif dan efisien		
	1 Indeks RB Ditjen AHU	Hasil Penilaian terhadap Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen AHU	
	2 Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen AHU	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	3	Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel	Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan (LK) Ditjen AHU yang tepat waktu	
	4	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Ditjen AHU	Jumlah pegawai yang puas terhadap kepegawaian dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%	
	5	Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media	
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU	
	7	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan Ditjen AHU	Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%	
5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum			
SK 10	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen administrasi hukum umum			
	1	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU	Jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi dibagi jumlah seluruh tata kelola TIK Ditjen AHU dikali 100%	
	2	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	Jumlah waktu layanan yang tersedia dalam satu tahun dibagi jumlah waktu dalam satu tahun dikali 100%	
	3	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dibagi jumlah seluruh kebutuhan layanan TIK dikali 100%	
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			
SK 11	Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah			
	1	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNPB tahun berjalan dikurang jumlah PNPB tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNPB tahun sebelumnya, dikali 100%	
SK 12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD			
	1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	
SK 13	Terwujudnya layanan BHP yang berkepastian hukum			
	1	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan Balai Harta Peninggalan masuk dikali 100%	
SP07-02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran			
	1	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti	Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali 100%	
1572	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional			
SK 2	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif			
	1	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%	
SK 3	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif			
	1	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti	Jumlah perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penunjukan penanganan perkara di Forum Internasional yang diterima AHU dari Presiden dikali 100%	
SK 4	Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia			
	1	Persentase pemberian bantuan hukum di bidang kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum	Jumlah permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang masuk dikali 100%	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan			Ditjen Pemasyarakatan
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan dengan metode survey eksternal	
1578	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama			
SK 1	Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran			
	1	Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis TI yang diselesaikan	Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis TI yang diselesaikan	
	2	Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi	Jumlah Data Tahanan dan Narapidana yang terverifikasi dibagi Jumlah Total Tahanan dan Narapidana dikali 100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 2	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Masyarakat			
	1	Jumlah MoU, PKS, dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah MoU, PKS, dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama Masyarakat yang ditindaklanjuti	
	2	Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan layanan kerja sama sesuai standar	Jumlah UPT Masyarakat yang menerapkan standar layanan kerjasama	
SK 3	Meningkatnya kualitas data pelaksanaan dipertukarkan pada SPPT berbasis TI di UPT			
	1	Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran data SPPT-TI	Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran data SPPT-TI	
SK 4	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Masyarakat khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama			
	1	Jumlah wilayah yang melaksanakan bintek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Masyarakat	Jumlah wilayah yang melaksanakan bintek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Masyarakat	
1579	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi			
SK 5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi pada UPT Masyarakat			
	1	Persentase Warga Binaan Masyarakat yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Warga Binaan Masyarakat yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Warga Binaan Masyarakat dikali 100%	
1581	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara			
SK 6	Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan			
	1	Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan administrasi sesuai dengan standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan perawatan dan administrasi sesuai dengan standar dibagi Jumlah Tahanan dikali 100%	
SK 7	Persentase basan barang yang dikelola dengan baik sesuai standar			
	1	Persentase basan barang yang dikelola dengan baik sesuai standar	Jumlah Basan Barang yang dikelola sesuai standar dibagi jumlah basan barang dikali 100%	
1583	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat			
SK 8	Meningkatnya layanan dukungan manajemen pada seluruh Satuan Kerja Masyarakat			
	1	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	3	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Maturitas SPIP	
	4	Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	
SK 9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	1	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	
	2	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	
	3	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
	4	Jumlah Gedung/Bangunan	Jumlah Gedung/Bangunan	
SK 10	Layanan Perkantoran			
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	
SK 11	Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Masyarakat			
	1	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	
	2	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	
	3	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah			
SK 12	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Masyarakat di wilayah			

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	1 Persentase UPT Masyarakat di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar	Jumlah UPT Masyarakat di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar dibagi Jumlah UPT Masyarakat dikali 100%	
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar		
	1 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%	
	2 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%	
	3 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%	
	4 Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi	
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar		
	1 Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali 100%	
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basen Baran di wilayah sesuai standar		
	1 Persentase basen baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basen baran sesuai standar	Jumlah basen baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basen baran sesuai standar dibagi Jumlah Basen baran dikali 100%	
SK 16	Meningkatnya Kapasitas Hunian		
	1 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	
	2 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	
	3 Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	
	4 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan	
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker		
	1 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	
	2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	
	3 Tersedianya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	Tersedianya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	
	4 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Masyarakat, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat		
	1 Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	Jumlah rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dibagi jumlah tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dikali 100%	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat		Ditjen Masyarakat
SP06-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat Menuju Manusia Mandiri		
	1 Persentase Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat yang Berdaya Guna Setelah Bebas	Jumlah Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat yang Berdaya Guna Setelah Bebas dibagi Jumlah Klien dikali 100%	
1580	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi		
SK 1	Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana		
	1 Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)	Jumlah narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantive dan administrative untuk disulikan mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) dikali 100%	
	2 Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas	Jumlah narapidana yang bekerja di lapas industri dibagi total narapidana di lapas industri dikali 100%	
1577	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak		
SK 2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Serta Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rangka Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Demi Kepentingan Anak		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	1	Persentase Anak yang Mendapatkan Hak-Haknya Dalam Proses Pembinaan (Pendidikan dan Integrasi)	Jumlah Anak yang Memperoleh Pendidikan dan Integrasi dibagi Jumlah Anak dikali 100%	
	2	Persentase Anak yang Mendapatkan Pendampingan dan Diversi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Diversi dibagi Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan dikali 100%	
SK 3	Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Pemasyarakatan			
	1	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar	Jumlah Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
	1	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	
	2	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	
	3	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP dikali 100%	
	4	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	
SK 5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar			
	1	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%	
	2	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah Klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%	
	3	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikali 100%	
SK 6	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	1	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah Anak dikali 100%	
	2	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah Anak dikali 100%	
SP08-03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan			
	1	Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah Residivis pada Taghun berjalan dibagi Jumlah Narapidana	
1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban			
SK 1	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan			
	1	Persentase pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diselesaikan sesuai standar	Jumlah pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diselesaikan sesuai standar dibagi Jumlah Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik dikali 100%	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	
	2	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	$\frac{\Sigma \text{UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib}}{\Sigma \text{UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan}} \times 100\%$	
	3	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah Gangguan Keamanan yang Ditindak dan Ditanggulangi dibagi Jumlah Gangguan Keamanan dikali 100%	
P10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			Ditjen Imigrasi
SP10-01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan keimigrasian dengan metode survey eksternal	
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi			
SK 1	Terciptanya Keamanan dan Layanan Lalu Lintas Keimigrasian serta Meningkatnya tempat pemeriksaan			

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan		
	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Keimigrasian	Perhitungan target jumlah pelanggaran lalu lintas keimigrasian tahun sebelumnya dibagi jumlah pelanggaran lalu lintas keimigrasian di tahun sekarang x 100%	
	2 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Lalu Lintas Keimigrasian	Survei tingkat kualitas layanan lalu lintas keimigrasian pada satker keimigrasian	
	3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan TPI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan TPI	
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian		
SK 2	Terciptanya Ketertiban Melalui Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian		
	1 Persentase Pemberian Izin Tinggal Kepada WNA Sesuai Peruntukannya	Jumlah WNA yang memperoleh izin tinggal sesuai peruntukannya dibagi jumlah WNA pemohon izin tinggal x 100%	
	2 Persentase Penyelesaian Izin Tinggal yang Tepat Waktu	Jumlah WNA yang memperoleh izin tinggal secara tepat waktu dibagi jumlah WNA yang permohonannya lengkap secara administratif x 100%	
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian		
SK 3	Terwujudnya Kerja Sama Keimigrasian Secara Tepat Waktu dan Berkelanjutan		
	1 Persentase Kerja Sama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti dan Diimplementasikan	Jumlah kerjasama keimigrasian yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh kerja sama yang dilakukan x 100%	
SK 4	Terselenggaranya Layanan Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN yang terlaksana		
	1 Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian		
SK 5	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian		
	1 Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan SISTIK	Menggunakan survey kepada stakeholder	
1590	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi		
SK 6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		
	1 Persentase Peningkatan Layanan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan realisasi anggaran dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan pada DIPA dikali 100 %	
SK 7	Meningkatnya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi		
	1 Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan realisasi anggaran dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan pada DIPA dikali 100%	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
SK 8	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	
SK 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian		
	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Survei tingkat kualitas layanan keimigrasian pada satker keimigrasian	
SK 10	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi		
	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	
SK 11	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker		
	1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan dengan metode survey	
SK 12	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	1 Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Perkantoran		
	1 Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	
SP10-02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	Perhitungan target jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / jumlah pelanggaran di tahun sekarang x keimigrasian	
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian			
SK 1	Meningkatnya Kualitas Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat			
	1	Persentase Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat dan Ditindaklanjuti	Jumlah informasi intelijen keimigrasian yang akurat dan ditindaklanjuti dibagi seluruh informasi intelijen yang dihasilkan selama setahun dikali 100%	
1586	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian			
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian			
	1	Persentase Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Secara Tuntas	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi seluruh pelanggaran x100%	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian			
	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / jumlah pelanggaran di tahun sekarang x 100%	
SK 4	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi			
	1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	
SK 5	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi			
	1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	
SK 6	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan			
	1	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	
P09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			Ditjen Kekayaan Intelektual
SP09-01	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia			
	1	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali 100%	
	2	Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	Selisih jumlah produk KI yang dilindungi tahun berjalan dengan jumlah produk KI tahun sebelumnya dibagi jumlah produk KI tahun sebelumnya dikali 100%	
	3	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Selisih jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun sebelumnya dengan jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun berjalan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun sebelumnya dikali 100%	
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri			
SK 1	Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang Berkualitas			
	1	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Jumlah permohonan Hak Cipta yang dicatat tepat waktu dibagi target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan dikali 100%	
	2	Persentase penyelesaian permohonan desain industri	Jumlah permohonan Desain Industri yang diselesaikan tepat waktu dibagi target permohonan Desain Industri tahun berjalan dikali 100%	
	3	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan tahun berjalan dikali 100%	
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual			
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis			
	1	Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual	Selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali 100%	
	2	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah peserta diseminasi yang mengalami peningkatan pemahaman KI dibagi jumlah seluruh peserta diseminasi dikali 100%	
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis			

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia		
	1 Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi	jumlah permohonan merek yang diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku	
	2 Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta	
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		
SK 4	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia		
	1 Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	jumlah permohonan Paten, DTLST, dan RD yang diselesaikan tepat waktu dibagi target penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD dikali 100%	
	2 Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Paten, DTLST, dan RD	jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta	
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		
SK 5	Layanan Online Kekayaan Intelektual		
	1 Keberlangsungan dan keberfungsian layanan teknologi informasi kekayaan intelektual 1 x 24 jam x 365 hari	1. Downtime 2. Bug fix 3. Error	
	2 Integrasi sistem teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual	1. Jumlah sistem teknologi informasi yang terintegrasi 2. Jumlah layanan kekayaan intelektual yang terintegrasi	
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual		
SK 6	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien		
	1 Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks penilaian Reformasi Birokrasi	
	2 Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang Akuntabel	Menurunnya jumlah temuan	
	3 Persentase opini positif terhadap pemberitaan terhadap DJKI di media	jumlah opini positif dibagi dengan jumlah berita yang keluar dikali 100%	
	4 SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	
	5 Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kekayaan Intelektual mendapatkan Nilai Baik	
	6 Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Penilaian berdasarkan pada hasil SMART DJA	
	7 Indeks kepuasan layanan administrasi fasilitatif di lingkungan DJKI	Indeks penilaian	
	8 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara	
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
SK 7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM		
	1 Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di tahun berjalan	
	2 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah stakeholder penerima diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah di tahun berjalan	
SS4	Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;		
	1 Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM ditambah jumlah institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM)	
	2 Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang Peduli HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2019	
	3 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan sejumlah 240 kasus) dikali 100%	
P11	Program Pemajuan HAM		Ditjen HAM
SP11-01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
	1 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	
	2 Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	3 Persentase Kab/Kota Peduli HAM	(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	
	4 Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan sejumlah 240 kasus) dikali 100%	
	5 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM) x 100%	
	6 Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	
	7 Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100%)	
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM		
SK 1	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		
	1 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM) x 100%	
1605	Pelayanan Informasi HAM		
SK 2	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		
	1 Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat / jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang tersedia x 100%	
1606	Kerja Sama HAM		
SK 3	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		
	1 Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kerja sama HAM yang di ajak) x 100%	
SK 4	Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		
	1 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	
	2 Persentase institusi daerah yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM	(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM		
	1 Persentase Kab/Kota Peduli HAM	(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat		
SK 6	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
	1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan sejumlah 240 kasus) dikali 100%	
SK 7	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial		
	1 Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	
1609	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		
SK 8	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM		
	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I selama tahun berjalan	
	2 Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama tahun berjalan	
	3 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama tahun berjalan	
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		
SK 9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	1 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	
	2 jumlah kab/kota peduli HAM	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	
	3 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	
SK 10	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	1 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	
5853	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM		
SK 11	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti		
	1 Persentase Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100%)	
P09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		Ditjen Kekayaan Intelektual
SP09-02	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas		
	1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku	jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%	
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		
SK 1	Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri		
	1 Persentase Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi Hak Cipta dan Desain Industri yang dihasilkan dikali 100%	
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		
SK 2	Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	1 Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah rekomendasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang ditindak lanjuti	
SK 3	Terwujudnya fasilitasi Komisi Banding Paten		
	1 Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang ditindaklanjuti	
1596	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa		
SK 1	Meningkatnya penegakan hukum KI		
	1 Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara tuntas	rumus 1 jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100% rumus 2 hasil rumus 1 tahun berjalan dikurangi hasil rumus 1 tahun sebelumnya	
SK 2	Terselesainya penanganan pengaduan pelanggaran HKI		
	1 Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	Jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%.	
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
SK 3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal		
	1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah kegiatan pencegahan dan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah di tahun berjalan	
SS5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI		
	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh MENPAN RB	
	2 Indeks Integritas	Nilai survey persepsi integritas Kemenkumham	
P01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM		Sekretariat Jenderal
SP01-01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Survey internal	
	2 Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh MENPAN RB	
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	
1552	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM		
SK 1	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM		
	1 Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media	Jumlah opini positif pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media dibagi jumlah seluruh berita Kementerian Hukum dan HAM di media x 100%	
	2 Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	Jumlah publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi dibagi jumlah publikasi Kementerian Hukum dan HAM x 100%	
1553	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM		
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia		
	1 Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	Jumlah pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100%	
	2 Indeks kepuasan Layanan Kepegawaian	Survey internal	
1554	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM		
SK 3	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien		
	1 Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Jumlah satker yang punya LK sesuai SAP dibagi total satker dikali 100 % = (x-1)	
	2 Persentase Satuan kerja yang mendapatkan nilai IKPA diatas 93	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93 dibagi dengan jumlah seluruh satuan kerja x 100%	
1555	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM		
	1 Persentase Satuan Kerja yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	Jumlah Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART) dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
	2 Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan RB	
1556	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM		
SK 5	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
	1 Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tugas/jumlah seluruh BMN Kemenkumham) x 100%	
	2 Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah nilai temuan tahun (n-1) - n / jumlah nilai temuan n-1) x 100 %	
1557	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahaan Kementerian Hukum dan HAM		
SK 6	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahaan Kementerian Hukum dan HAM		
	1 Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan umum internal Kesekjenan dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
	2 Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran sekretariat jenderal	Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan perkantoran dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
SK 7	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.		
	1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran satker dibawah kanwil yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	
	2 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	Menghitung jumlah pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	
	3 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	Menghitung jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	
	4 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	Menghitung jumlah asset BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	
	5 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.	Menghitung jumlah layanan persuratan melalui sumaker yang diindaklanjuti.	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	6	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar	Menghitung jumlah berita yang terpublikasikan kepada masyarakat secara cepat dan benar	
	7	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan	Menghitung jumlah sarana dan prasarana di Kantor Wilayah yang sesuai kebutuhan	
5849	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM			
SK 8	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik			
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Hasil survey	
P03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM			Inspektorat Jenderal
SP03-01	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan KEMENKUMHAM			
	1	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	
	2	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP	
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 1	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II			
SK 2	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III			
SK 3	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV			
SK 4	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V			
SK 5	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI			
SK 6	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting			
	1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
SP03-02	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi			
	1	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	laporan hasil evaluasi SAKIP Kemenkumham	
	2	Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90	laporan hasil evaluasi PMPRB Kemenkumham	
	3	Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	hasil evaluasi satker WBK/WBBM dari kemenpanRB	
	4	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM	hasil penilaian mandiri persepsi integritas kemenkumham oleh ITJEN	
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 7	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM			
	1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL I	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I	Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I	Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL I	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan ITWIL I	
5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL I	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I	
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		
SK 8	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		
1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL II	
2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II	Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II	Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL II	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan ITWIL II	
5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL II	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II	
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		
SK 9	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		
1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL III	
2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III	Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III	Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL III	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan ITWIL III	
5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL III	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III	
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV		
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		
1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	
2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV	Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV	Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL IV	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan ITWIL IV	
5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL IV	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV	
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V		
SK 11	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		
1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL V	
2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V	Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V	Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
	4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL V	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, di lingkungan ITWIL V	
	5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL V	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL V	
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI			
SK 12	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM			
	1	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL VI	
	2	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI	Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
	3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI	Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL dikali 100%	
	4	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL VI	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, di lingkungan ITWIL VI	
	5	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL VI	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL VI	
1569	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM			
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan pungutan liar			
	1	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun	
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal			
	1	Indeks RB ITJEN	Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP	
	2	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP	
	3	Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP	
	4	Nilai WBK/WBBM ITJEN	Hasil evaluasi WBK/WBBM ITJEN oleh APIP	
	5	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara	Jumlah Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke kas Negara yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke kas Negara DIKALI 100%	
	6	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi	Jumlah Rekomendasi APIP terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah Rekomendasi APIP terkait administrasi dikali 100%	
	7	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara	Jumlah Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas Negara yang ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas Negara dikali 100%	
	8	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi	Jumlah Rekomendasi BPK terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah Rekomendasi BPK terkait administrasi dikali 100%	
P05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM			BPSDM
SP05-01	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM			
	1	persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user	Menggunakan survey (N/X) x 100% N = $\sum$ Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut assesment yang dikembalikan unit pengguna X = $\sum$ Total jumlah data Survei yang dikirimkan oleh Puspenkom	
	2	persentase alumni diklat yang sudah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	Menggunakan survey (N/X) x 100% N = $\sum$ Jumlah alumni pelatihan yang melaksanakan tugas / menduduki jabatan sesuai kompetensi bidang tugasnya X = $\sum$ Total jumlah alumni pelatihan	
1621	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM			
SK 1	terselenggaranya pelatihan fungsional dan ham			

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	1	persentase alumni diklat fungsional dan ham yang diangkat menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut assesment yang dikembalikan unit pengguna $X = \sum$ Total jumlah data Survei yang dikirimkan oleh Puspenkom	
	2	persentase alumni diklat pembimbing kemasyarakatan yang diangkat menjadi pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah penilaian uji kompetensi $X = \sum$ Total jumlah aparatur Kemenkumham	
1622	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi			
SK 2	terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM			
1	1	persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user	Total output pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	
	2	persentase aparatur kementerian hukum dan ham yang telah dilakukan uji kompetensi	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah aparatur yang mengikuti penilaian uji kompetensi $X = \sum$ Total jumlah aparatur Kemenkumham	
1623	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan			
SK 3	terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan			
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		Total output pelatihan di Badiklat Hukum dan HAM	
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
SK 4	Penyelenggaraan Diklat Pada Balai Diklat Hukum dan HAM			
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM		Total output pelatihan di Badiklat Hukum dan HAM	
SP05-02	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Kemigrasian dan Pemasyarakatan			
1	1	persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasyarakatan dengan predikat memuaskan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasyarakatan dengan predikat memuaskan $X = \sum$ Total jumlah lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasyarakatan	
	2	persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan $X = \sum$ Total Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	
1620	Pendidikan Kedinasan			
SK 1	terselenggaranya pendidikan kedinasan di bidang pemasyarakatan dan imigrasi			
1	1	terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik ilmu pemasyarakatan	Penyelenggaraan pendidikan kedinasan politeknik ilmu pemasyarakatan	
	2	terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik imigrasi	Penyelenggaraan pendidikan kedinasan politeknik ilmu imigrasi	
1624	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM			
SK 2	tersedianya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya			
1	Jumlah layanan Dukungan Administratif dan Fasilitatif BPSDM Hukum dan HAM		Jumlah layanan Dukungan Administratif dan Fasilitatif BPSDM Hukum dan HAM	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2021-2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			
SS 1	Terpenuhiya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan		
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Dilakukan survey kepuasan pembina terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas		Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target penyusunan RPUU dikalikan 100 %	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	Jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
1601 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan			
SK 1	Rancangan Peraturan Perundang-undangan		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU	Jumlah RUU yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata	Jumlah RUU KUH Perdata / KUH Acara Perdata yang disusun dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI	Jumlah RUU prakarsa Kemenkumham yang dibahas di DPR dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP	Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR RI	
	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah	Jumlah RPP yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah konsepsi RPUU yang selesai disusun	
	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden	Jumlah Rpepres yang selesai disusun dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri	Jumlah Rpermen yang selesai penyelarasan dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan	Jumlah RUU Kepailitan yang disusun dalam satu tahun anggaran	
	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	Jumlah RUU Jaminan Benda Bergerak yang disusun dalam satu tahun anggaran	
5851 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukamkesra			
SK 2	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Bidang Polhukamkesra		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang politik dan pemerintahan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang pertahanan dan keamanan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
5852 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Bidang Perekonomian			
SK 3	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Bidang Perekonomian		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	
1600 - Litigasi Peraturan Perundang-undangan			
SK 4a	Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung	Jumlah tersusunnya keterangan presiden dan jawaban termohon dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	
	Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	Jumlah pendampingan persidangan di MK dibagi dengan permohonan pendampingan dikalikan 100 %	
SK 4b	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	Jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi dibagi dengan jumlah permohonan dikalikan 100 %	
1602 - Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan			
SK 5	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan		Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dibagi dengan permohonan pengundangan dikalikan 100 %	
	Persentase (%) dokumen hukum yang diterbitkan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan pada laman resmi dijen PP dibagi dengan permohonan pengundangan dikalikan 100 %	
	Persentase (%) peningkatan kunjungan website/laman	Jumlah kunjungan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya dikalikan 100 %	
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	
1598 - Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
SK 6	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi		Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Persentase fasilitas perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham	Jumlah fasilitas perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham dibagi dengan perencanaan dikalikan 100 %	
	Jumlah terselesainya kebijakan teknis fasilitas perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah kebijakan teknis fasilitas perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang selesai disusun	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
	jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah			
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah		Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Jumlah fasilitas perancangan perda dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	
SP3B 1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum		Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan peninjauan analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan dibagi dengan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya x 100%	
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 x 100%	
1611 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			
SK 1	Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan dibagi dengan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya x 100%	
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	
	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum	
1613 – Perencanaan Hukum Nasional			
SK 2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional
	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	Jumlah dokumen Prolegnas di lingkungan Pemerintah; Jumlah dokumen Progsun PP Perpres yang akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan; Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan Perda	
	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	Jumlah Naskah akademik yang disusun	
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselarskan sistematika dan muatannya	Jumlah Naskah akademik RUU yang diselarskan sistematika dan materi muatannya	
5256 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di kantor wilayah	
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM		
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	Ditjen HAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait dibagi jumlah surat rekomendasi yang disampaikan Ditjen HAM ke instansi terkait) dikali 100%.	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM) x 100%	
1605 - Pelayanan Informasi HAM			
SK 1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		Direktur Informasi HAM
	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	(Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat / jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang tersedia) x 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1607 - Pelayanan Komunikasi Masyarakat			
SK 2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait dibagi jumlah surat rekomendasi yang disampaikan Ditjen HAM ke instansi terkait) dikali 100%.	
SK 3	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara Non-Yudisial		Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti	
1606 - Kerja Sama HAM			
SK 4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		Direktur Kerjasama HAM
	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kerja sama HAM yang diajaki) x 100%	
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM		Direktur Kerjasama HAM
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	
SK 6	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM		Direktur Kerjasama HAM
	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	(Jumlah capaian Aksi K/L/D yang memenuhi target/jumlah total aksi K/L/D) x 100%	
1604 - Diseminasi dan Penguatan HAM			
SK 7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM) x 100%	
5853 - Analisa, Penyusunan dan Laporan Instrumen HAM			
SK 8	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti		Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia
	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan) dikali 100%	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	-	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	
	Jumlah kab/kota peduli HAM	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual	
SP2A-1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%	
1573 - Administrasi Hukum Perdata			
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum		Direktur Perdata

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang masuk pada Direktorat Perdata dikali 100%	
1575 - Administrasi Hukum Tata Negara			
SK 2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum		Direktur Tata Negara
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Tata Negara dikali 100%	
1572 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional			
SK 4	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif		Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%	
SK 5	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif		Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti	Jumlah perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penunjukan penanganan perkara di Forum Internasional yang diterima AHU dari Presiden dikali 100%	
SK 6	Terwujudnya penyelenggaraan layanan sase hukum di Malaysia		Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum	Jumlah permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan yang masuk dikali 100%	
1574 - Administrasi Hukum Pidana			
SK 7	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum		Direktur Pidana
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Jumlah layanan di bidang administrasi hukum pidana yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk pada Direktorat Pidana dikali 100%	
5850 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum			
SK 8	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU		Direktur Teknologi Informasi
	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU	Jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi dibagi jumlah seluruh tata kelola TIK Ditjen AHU dikali 100%	
	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU	Jumlah waktu layanan yang tersedia dalam satu tahun dibagi jumlah waktu dalam satu tahun dikali 100%	
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dibagi jumlah seluruh kebutuhan layanan TIK dikali 100%	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum		1. Kepala Kantor Wilayah 2. Ketua BHP
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan Balai Harta Peninggalan masuk dikali 100%	Ketua BHP
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD		Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	
SP2B 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas		Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Akan dilaksanakan oleh Balitbangkumham dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Balitbangkumham melalui aplikasi survey.balitbangkumham.go.id	
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	Nilai rata-rata dari penilaian pelaksanaan seluruh kerjasama dengan komponen yaitu : disepakati, dilaksanakan, memberikan manfaat kedua belah pihak, dan berkelanjutan. $IPK = \frac{\sum_{i=1}^n ipki}{n}$	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		$ipk = \frac{(A + B + C + D)}{n}$ Keterangan : IPK = Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan ipki = Nilai Indeks Kerjasama Pemasyarakatan yang ke-i yang dilaksanakan n = Banyaknya Kerjasama yang Dilaksanakan A = Kerjasama Disepakati B = Kerjasama Dilaksanakan C = Kerjasama Memberikan Manfaat Kedua Belah Pihak D = Kerjasama Berkelanjutan	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan didapat melalui survey kepuasan pengguna layanan IT Pemasyarakatan	
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Akan dilakukan melalui penilaian parameter derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.	
1578. Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi			
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin	Menghitung Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang telah memiliki Klinik Berizin sesuai standar Kementerian Kesehatan	
	Meningkatnya Jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar	
	Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar	Jumlah UPT Pelaksana Rehabilitasi yang sesuai standar yang dilakukan dengan menilai proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan standar berdasarkan instrument penilaian standar rehabilitasi.	
	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan	Menghitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang sakit dibandingkan dengan jumlah seluruh Tahanan/Narapidana/Anak pada tahun berjalan	
	Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan	Menghitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh Tahanan/Narapidana/Anak pada tahun berjalan	
	Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasyarakatan	Menghitung Persentase Tahanan, Anak dan Narapidana yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar pada tahun berjalan sesuai dengan standar	
	Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan sesuai standar	Menghitung Persentase Tahanan, Anak dan Narapidana yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar pada tahun berjalan sesuai dengan standar	
	Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan	Jumlah Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan dibagi Jumlah Tahanan dan WBP yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan dikali 100%	
1578. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama			
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama Pemasyarakatan		Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain	Jumlah kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain dibagi Jumlah kerjasama pemasyarakatan yang direncanakan dikali 100%	
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar berdasarkan jawaban instrumen standar kerjasama yang telah diisi oleh UPT Pemasyarakatan. Apabila hasil penilaian instrumen telah mencapai passing grade yang telah ditetapkan maka UPT Pemasyarakatan tersebut dinyatakan telah sesuai standar	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan berbasis TI		Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Penguatan SDP Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI	Jumlah UPT Yang Melakukan Input Data Guna Pertukaran Data Pada SPPT-TI	
	Jumlah Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan Berbasis TI Yang Diselesaikan	
	Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan	Jumlah Penyelesaian Permintaan Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan Jaringan Dibagi dengan Jumlah Permintaan	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan Jaringan Dikali 100%	
	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data	Jumlah Satker Yang Meningkatkan Kualitas Mutu Data Dibagi Jumlah Total Satker Dikali 100%	
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah		Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$ Keterangan = A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%	
SP2C 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian		Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi			
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas		Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian			
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian		Direktur Izin Tinggal Keimigrasian

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian			
SK 7	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian		Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan	Jumlah kerjasama keimigrasian yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah seluruh kerja sama yang dihasilkan x 100%	
1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian			
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah		Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SP2D	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia		Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	jumlah penyelesaian permohonan di tahun berjalan dibagi jumlah permohonan yang masuk di tahun berjalan dikali 100%	
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali 100%	
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	selisih jumlah produk KI dan komunal yang tercatat di tahun berjalan dengan jumlah produk KI dan komunal di tahun sebelumnya dibagi jumlah produk KI dan komunal di tahun sebelumnya dikali 100%	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	jumlah penanganan aduan pelanggaran KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan dikali 100%	
1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri			
SK 1	Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia		Direktur Hak Cipta & Desain Industri
	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	jumlah permohonan Hak Cipta yang dicatat tepat waktu dibagi target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan dikali 100%	
	Persentase penyelesaian permohonan desain industri	jumlah permohonan Desain Industri yang diselesaikan tepat waktu dibagi target permohonan Desain Industri tahun berjalan dikali 100%	
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri	jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan tahun berjalan dikali 100%	
1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual			
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis		Direktur Kerjasama & Pemberdayaan KI
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	selisih jumlah peserta diseminasi yang mengalami peningkatan pemahaman KI tahun berjalan dikurang jumlah peserta diseminasi yang mengalami peningkatan pemahaman KI tahun sebelumnya dibagi jumlah peserta diseminasi yang mengalami peningkatan pemahaman KI tahun sebelumnya dikali 100%	
1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis			
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia		Direktur Merek dan Indikasi Geografis
	Persentase merek dan Indikasi geografis yang dilindungi	selisih jumlah penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis sesuai peraturan perundang-undangan yang masuk di tahun berjalan dengan jumlah penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis sesuai peraturan perundang-undangan di tahun sebelumnya dibagi jumlah penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis sesuai peraturan perundang-undangan di tahun sebelumnya dikali 100%	
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan tahun berjalan dikali 100%	
1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang			
SK 4	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia		Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	selisih jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan perundang-undangan di tahun berjalan dengan jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan perundang-undangan di tahun sebelumnya dibagi jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan perundang-undangan di tahun sebelumnya dikali 100%	
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan tahun berjalan dikali 100%	
1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa			
SK 5	Meningkatnya penegakan hukum KI		Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	jumlah penanganan aduan pelanggaran KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan dikali 100%	
	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%	
1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual			
SK 6	Layanan Online Kekayaan Intelektual		Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	Persentase peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal	Jumlah standar (SLA) yang terealisasi dibagi dengan jumlah standar (SLA) yang direncanakan dikali 100%	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM		Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah layanan KI yang difasilitasi di wilayah	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah berdasarkan lokus	
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal		Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah penanganan aduan pelanggaran KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan dikali 100%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah Jumlah penanganan aduan pelanggaran ki tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran ki tahun berjalan dikali 100%	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.		

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang masuk dikali 100%	Ditjen AHU
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna	Menghitung Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna adalah dengan Membagi Jumlah Klien Produktif dibagi dengan Jumlah Klien dikali 100%. $\% \text{ Klien Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah klien yang meneruskan pendidikan, bekerja atau berwiraswasta B = Jumlah Klien	Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah dikali 100%. $\% \text{ Pengelolaan Benda Baran} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Basan Eksekusi B = Jumlah Basan Inkrah (Mendapatkan Putusan)	Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis;	Menghitung Persentase Residivis adalah dengan menghitung jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidananya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan bebas dibagi dengan jumlah narapidana yang telah bebas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. $\% \text{ Menurunnya Residivis} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Mantan Narapidana yang telah bebas dan mengulangi tindak pidananya dalam Kurun Waktu 2 Tahun B = Jumlah Narapidana Bebas dalam Kurun Waktu 2 Tahun	Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Menghitung Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan adalah dengan Mengurangi Jumlah Tahanan dengan Jumlah Tahanan Overstaying. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. $\% \text{ Perlindungan Tahanan} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Tahanan B = Jumlah Tahanan Overstaying	Ditjen PAS
SP2A 2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang masuk dikali 100%	
SK 3	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran		Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang masuk, ditambah jumlah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diusulkan, dikali 100%	
SP2B 2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan		Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Menghitung Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Keberhasilan Pentahapan Pembinaan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		$\text{Indeks Pembinaan} = \frac{(A + B + C + D)}{4} \times 100\%$ A $= \frac{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$ B $= \frac{\text{Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$ C $= \frac{\text{Jumlah Narapidana Terampil Bersertifikat}}{\text{Jumlah Narapidana Dilatih}} \times 100\%$ D $= \frac{\text{Jumlah Narapidana Bekerja dan Produktif}}{\text{Jumlah Narapidana yang Mengikuti Program}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin B = Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian C = Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat D = Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	Menghitung Indeks Pemenuhan Hak Narapidana Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pemenuhan Hak Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikal 100%. $\text{Indeks Pemenuhan Hak} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ A $= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat dan Administrasi untuk diusulkan mendapatkan hak Remisi}} \times 100\%$ B $= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat dan Administrasi untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi B = Persentase Narapidana yang Mendapatkan Layanan Program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMG)	
	Indeks keberhasilan program pembinaan klien masyarakat	Menghitung Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Keberhasilan Pembinaan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikal 100%. $\text{Indeks Pembinaan} = \frac{(A + B + C)}{3} \times 100\%$ A $= \frac{\text{Jumlah Litmas yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Permintaan Litmas}} \times 100\%$	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		$B = \frac{\text{Jumlah Klien yang mengikuti Program Pemb}}{\text{Jumlah Klien Pemasarakatan}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Penyelesaian Litmas B = Persentase Bimbingan Klien Pemasarakatan C = Persentase Pengawasan Klien Pemasarakatan	
	Indeks pembinaan khusus anak	Menghitung Indeks Pengentasan Anak Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pengentasan Anak Dibagi dengan Jumlah Variabel Dikali 100%. $\text{Indeks Pengentasan Anak} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Anak yang Mendapatkan Diversi}}{\text{Jumlah Anak Didampingi yang Memenuhi Syarat Diversi}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Anak yang Melanjutkan Pendidikan}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Pengentasan Anak dalam Proses Pra Adjudikasi dan Adjudikasi B = Persentase Pengentasan Anak pada Proses Post Adjudikasi	
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	Menghitung Indeks Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pengelolaan Basan Baran Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%. $\text{Indeks Lola Basan Baran} = \frac{(A + B + C + D + E)}{5} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Basan Diregistrasi dan Terverifikasi Sesuai Tingkat Pemeriksaan}}{\text{Jumlah Benda Situasi Negara}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Baran Diregistrasi dan Terverifikasi Sesuai Tingkat Pemeriksaan}}{\text{Jumlah Barang Rampasan Negara}} \times 100\%$ $C = \frac{\text{Jumlah Basan dan Baran yang Diklasifikasikan dan Ditempatkan}}{\text{Jumlah Basan dan Baran}} \times 100\%$ $D = \frac{\text{Jumlah Basan dan Baran yang Ditaksir Nilai}}{\text{Jumlah Basan dan Baran}} \times 100\%$ $E = \frac{\text{Jumlah Penyimpanan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Basan dan Baran}}{\text{Jumlah Basan dan Baran}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Registrasi Benda Situasi Negara B = Persentase Registrasi Barang Rampasan Negara C = Persentase Pengklasifikasian dan Penempatan Basan dan Baran D = Persentase Penilaian Basan dan Baran	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		E = Persentase Penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Basan dan Baran	
	Indeks Pelayanan Tahanan	Menghitung Indeks Pelayanan Tahanan Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pelayanan Tahanan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%. $\text{Indeks Pelayanan Tahanan} = \frac{(A + B + C + D)}{4} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Data Tahanan Terverifikasi}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Pelayanan Hukum}} \times 100\%$ $C = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Mendapatkan Bimbingan Keterampilan}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$ $D = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Mendapatkan Bimbingan Kepribadian}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Pengadministrasian Tahanan B = Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum C = Persentase Tahanan yang Mendapatkan Bimbingan Keterampilan D = Persentase Tahanan yang Mendapatkan Bimbingan Kepribadian	
1581. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara			
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan		Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan dibagi Jumlah Tahanan Dikali 100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Fasilitas bantuan Hukum dibagi Jumlah Pemohon Bantuan Hukum Dikali 100%	
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran		Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		
	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran	Jumlah Basan Basan	
1580. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi			
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi		Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%	
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI	Jumlah Narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI	
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	
	Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Narapidana Terampil Bersertifikat Dibagi Jumlah Narapidana Dilatih Dikali 100%	
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang mengikuti program asimilasi dikali 100%	
	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	
1577. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak			
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Penyelesaian Litmas	Jumlah Litmas yang Diselesaikan dibagi Jumlah Permintaan Litmas dikali 100%	
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	Jumlah Klien yang mengikuti Program Pembimbingan dibagi Jumlah Klien Pemasyarakatan dikali 100%	
	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	Jumlah Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah Klien Pemasyarakatan dikali 100%	
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)		Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	Jumlah Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restorative dibagi Jumlah Klien dikali 100%	
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak		Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	Jumlah Anak yang melanjutkan pendidikan di LPKA dibagi Jumlah Anak di LPKA dikali 100%	
	Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	Jumlah Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat dibagi Jumlah Anak dikali 100%	
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Remisi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Remisi dikali 100%	
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%	
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Anak Yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal Dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah		Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Menghitung Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%. $\text{Indeks Pemasyarakatan} = \frac{(A + B + C + D + E + F + G + H + I)}{9} \times 100\%$ A = Nilai Indeks Keamanan di Wilayah B = Nilai Indeks Derajat Parameter Kesehatan di Wilayah C = Nilai Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah D = Nilai Indeks Pengelolaan Basan dan Baran di Wilayah E = Nilai Indeks Pembinaan Narapidana di Wilayah F = Nilai Indeks Pengentasan Anak di Wilayah G = Nilai Indeks Pembimbingan di Wilayah H = Nilai Indeks Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah I = Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar		Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	Jumlah Tahanan Overstaying Dibagi Dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%, Hasil	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Dibagi Jumlah Tahanan Dikali 100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Dibagi Jumlah Pemohon Bantuan Hukum Dikali 100%	
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi		Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan Formal Dikali 100%	
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin Dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Jumlah Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif Dibagi Jumlah Narapidana Yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%	
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	(Indikator Khusus Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bagi Narapidana	
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar		Kepala Rupbasan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan dikali 100%	
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi Dibagi Dengan Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Inkras (Berkekuatan Hukum Tetap) Dikali 100%	
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar		Kepala Bapas
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	Jumlah Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali 100%	
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Dibagi Jumlah Pendampingan Anak Dikali 100%	
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Jumlah Klien Anak Yang Melanjutkan Pendidikan Di Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali 100%	
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar		Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Jumlah Anak Yang Terampil Dibagi Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Anak Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	
	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	Jumlah Anak Yang Meperoleh Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SS 5	Ikut berperserta serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.		
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	Berdasarkan Hasil Penilaian Instrument Keamanan Dan Ketertiban UPT Masyarakat	Ditjen PAS
	Indeks pengamanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	Ditjen Imigrasi
SP2B 3	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib		Direktur Jenderal Masyarakat
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	Berdasarkan Hasil Penilaian Instrument Keamanan Dan Ketertiban UPT Masyarakat	
1582. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Keamanan dan Ketertiban			
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban		Direktur Keamanan dan Ketertiban
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan Yang Masuk Dikali 100%	
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	$\frac{\Sigma \text{UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib}}{\Sigma \text{UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan}} \times 100\%$	
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	
5252. Penyelenggaraan Masyarakat di WilayahS			
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar		Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	$\frac{\Sigma \text{UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib}}{\Sigma \text{UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan}} \times 100\%$	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib dikali 100%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	
SP2C 2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian		Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian			
SK 3	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian		Direktur Intelijen Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SK 4	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian		Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	Jumlah produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dibagi seluruh produk intelijen yang dihasilkan dikali 100%	
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian			
SK 7	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian		Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SK 8	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian		Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks penegakan hukum Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat		
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum Presentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai	BPHN

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	
SP3B 2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum		Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	
1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional			
SK 4	Terperuhnya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat		Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100 %	
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan perpustakaan	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan kali 100 %	
1612 – Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat		Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terperuhnya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah		Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100%	
SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM		
	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{laporan penilaian kompetensi yang minimal cukup optimal atau masih memenuhi syarat}$ $X = \sum \text{Total laporan penilaian kompetensi}$	BPSDM

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan	BPSDM
SP1D 1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut assesment yang dikembalikan unit pengguna $X = \sum$ Total jumlah data Survei yang dikirimkan oleh Puspenkom	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi $X = \sum$ Total jumlah ASN Kemenkumham	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah alumni pelatihan yang melaksanakan tugas sesuai kompetensi bidang tugasnya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM			
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM		Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional $X = \sum$ Total modul kompetensi jabatan fungsional Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan fungsional dan HAM yang di nilai baik $X = \sum$ TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan fungsional dan HAM	
	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ alumni pelatihan fungsional dan ham yang meningkat kinerjanya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan fungsional dan ham	
	Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional $X = \sum$ Total modul kompetensi jabatan fungsional	
1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur			
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah output ASN yang memperoleh penilaian kompetensi sesuai standar $X = \sum$ Total jumlah target peserta penilaian kompetensi	
	Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah output ASN yang memperoleh penilaian kompetensi berbasis teknologi $X = \sum$ Total jumlah target penilaian kompetensi	
	Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi	Rumus perhitungan IKM yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan persepsi nilai	
1623 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan			
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan		Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		kompetensi teknis dan manajerial $X = \sum \text{Total modul kompetensi teknis dan manajerial}$	
	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang di nilai baik}$ $X = \sum \text{TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan}$	
	Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya}$ $X = \sum \text{Total jumlah alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan}$	
1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM			
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
	Nilai reformasi birokrasi	Berdasarkan nilai reformasi birokrasi yang diberikan Kemenpan	
	Nilai SMART	Berdasarkan nilai aplikasi SMART DJA	
	Nilai SAKIP	Berdasarkan nilai SAKIP yang diberikan Itjen	
	Indeks IKPA	Berdasarkan nilai indeks IKPA aplikasi OM SPAN Kemenkeu	
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah		Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan di wilayah}$ $X = \sum \text{TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan di wilayah}$	
SP1D 2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian		Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan}$ $X = \sum \text{Total Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan}$	
1620 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan			
SK 5	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi		Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Imigrasi
	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum \text{Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dengan predikat memuaskan}$ $X = \sum \text{Total Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan}$	
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian Menpan RB	Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Menpan RB	Sekretariat Jenderal
	Indeks maturitas SPIP	Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP	Inspektorat Jenderal
	Opini atas Laporan Keuangan	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi	$\frac{\sum \text{nilai tahun sekarang (n)} - \sum \text{nilai tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{nilai tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Balitbang Hukum dan HAM
SP1A 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI		Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah Satuan Kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah Satuan Kerja yang mendapat nilai capaian RB minimal 90 dibagi seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Jumlah Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh Satuan Kerja dikali 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	
1555. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja			
SK 1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien		Kepala Biro Perencanaan
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan	Jumlah Satuan Kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
1553. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM			
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia		Kepala Biro Kepegawaian
	Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	Jumlah pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement dibagi jumlah seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%	
1556. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM			
SK 3	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Biro Pengelolaan BMN
	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tugas/jumlah seluruh BMN Kemenkumham) x 100%	
	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah nilai temuan tahun (n-1) - n / jumlah nilai temuan n-1) x 100 %	
1557. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kementerian Hukum dan HAM			
SK 4	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Biro Umum
	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan umum internal Kesekjenan dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	
1552. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM			
SK 5	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Biro Humas
	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media	Jumlah opini positif pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media dibagi jumlah seluruh berita Kementerian Hukum dan HAM di media x 100%	
5849. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM			
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM		Kapusdatin
	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$Indeks Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$	
	Indeks Domain Tata kelola		
	Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		NDj adalah nilai Indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitas Kantor Wilayah yang efektif dan efisien		Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Survey internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi.	
6234 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU			
SK 10a	Meningkatnya citra positif Ditjen AHU		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media	
SK 10b	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian	Jumlah pegawai yang puas terhadap kepegawaian dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%	
SK 10c	Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU	Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan (LK) Ditjen AHU yang tepat waktu	
	Nilai IKPA Ditjen AHU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen AHU di Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)	
SK 10d	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Nilai SMART Ditjen AHU	Nilai capaian SMART Ditjen AHU	
SK 10e	Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks penilaian RB	Hasil Penilaian terhadap Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen AHU	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU	
SK 10f	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU	Jumlah kebutuhan BMN yang terpenuhi, tercatat, dan terkelola dengan baik dibagi jumlah kebutuhan BMN yang dianalisis dan direncanakan dikali 100%	
SK 10g	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumaha tanggaan dan ketatausahaan Ditjen AHU		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, kerumah tanggaan dan persuratan	Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan umum dan kerumaha tanggaan dibagi jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%	
SK 10h	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHU		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU	Hasil survei kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU	
SK 10i	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Nilai SAKIP Ditjen AHU	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen AHU	
	Nilai Maturitas SPIP DITJEN AHU	Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP pada Ditjen AHU	
6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP			
SK 11	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien		Ketua BHP
	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	rata-rata dari penjumlahan (Jumlah dokumen perencanaan anggaran dibagi jumlah target dokumen perencanaan anggaran dikali 100%), (jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah target laporan keuangan dikali 100%), dan (jumlah pemberitaan positif di media dibagi jumlah target pemberitaan di media dikali 100%)	
6235 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan			
SK 12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Itjen	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian SAKIP oleh Itjen	
	Nilai SMART	Hasil penilaian dalam aplikasi SMART Kemenkeu	
	Nilai IKPA	Hasil penilaian IKPA dari Kemenkeu	
	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah total SDM dikali 100%	
	Jumlah Layanan Perkantoran	Menghitung jumlah layanan perkantoran yang dilakukan Ditjenpas	
	Jumlah Kendaraan Bermotor	Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh Ditjenpas	
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Menghitung jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh Ditjenpas	
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Menghitung Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh Ditjenpas	
	Jumlah Gedung/Bangunan	Menghitung Jumlah Gedung/Bangunan yang dilakukan pemeliharaan/pembangunan oleh Ditjenpas	
SK 12b	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan		Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan	Menghitung Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan	
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker		Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Menghitung jumlah dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Menghitung Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Menghitung data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Menghitung Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	
	Jumlah Layanan Perkantoran	Menghitung jumlah layanan perkantoran yang dilakukan UPT	
	Jumlah Kendaraan Bermotor	Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT	
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Menghitung jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT	
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Menghitung Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT	
	Jumlah Gedung/Bangunan	Menghitung Jumlah Gedung/Bangunan yang dilakukan pemeliharaan/pembangunan oleh UPT	
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi			
SK 14a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I		Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
SK 14b	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja		Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi			
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah		Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	
6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual			
SK 16	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual		Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks penilaian Reformasi Birokrasi	
	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	
	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kekayaan Intelektual mendapatkan Nilai Baik	
	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Penilaian berdasarkan pada hasil SMART DJA	
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara	
6233 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP			
SK 17	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan		Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I selama tahun berjalan	
	Jumlah Layanan Internal	Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama tahun berjalan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama tahun berjalan	
6238 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya			
SK 18	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM		Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I selama tahun berjalan	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama tahun berjalan	
	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama tahun berjalan	
1614 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional		Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	
	Jumlah Layanan Internal	Jumlah Layanan Internal	
	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	
SP1A2 - Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel			
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		
1555 - Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja			
SK 8	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Biro Perencanaan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai smart diatas 95 dibagi jumlah seluruh satuan kerja dikali 100%	
1554 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM			
SK 9	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien		Kepala Biro Keuangan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai IKPA diatas 93 dibagi seluruh jumlah satuan kerja dikali 100%	
SP1B1 - Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel			Inspektur Jenderal
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah I
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II			
SK 3	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah II
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III			
SK 5	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah III
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV			
SK 7	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah IV
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V			
SK 9	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah V
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI			
SK 11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>		Inspektur Wilayah VI
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	
SP1B2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM		Inspektur Jenderal
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP	
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL I	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL I	
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II			
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah II
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL II	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL II	
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III			
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL III	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL III	
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV			
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL IV	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL IV	
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V			
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL V	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL V	
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI			
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL VI	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL VI	
SP1B 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI		Inspektur Jenderal

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham	
	persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Kemenkumham	
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)	Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM dari KemenpanRB	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL I	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL I	
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II			
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah II
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL II	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL II	
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III			
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL III	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL III	
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV			
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL IV	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL IV	
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V			
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL V	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL V	
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI			
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM		Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja di lingkungan ITWIL VI	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL VI	
1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ijtjen Kementerian Hukum dan HAM			
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang disusun	
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Indeks RB ITJEN	Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP	
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP	
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP	
SK 15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali 100%	
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	
SK 16	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Merunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user)	
SK 17	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran (001) dikali 100% Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran (002) dikali 100%	
	Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi	
SK 18	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel		Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	Hasil laporan keuangan Kemenkumham	
	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal	Persentase realisasi keuangan ITJEN	
	Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi CHR Anggaran yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi CHR Anggaran dikali 100%	
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset		Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	$\frac{\sum \text{nilai tahun sekarang (n)} - \sum \text{nilai tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{nilai tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	
5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum			

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
5855 - Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia			
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
5856 - Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan			
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		Kepala Pusat Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi	$\frac{\sum \text{data dan informasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{data dan informasi yang dihasilkan}} \times 100$	
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di jurnal	$\frac{\sum \text{sitasi tahun sekarang (n)} - \sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia		Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik	$\frac{\sum \text{Realisasi Capaian}}{\sum \text{Target Capaian}} \times 100\%$	
1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia			
SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{pegawai yang mendapat layanan dukungan manajemen}}{\sum \text{pegawai seluruhnya}} \times 100\%$	
	Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi	$\frac{\sum \text{capaian kinerja reformasi birokrasi}}{\sum \text{target kinerja reformasi birokrasi}} \times 100\%$	
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{masyarakat yang mendapat kepuasan dari layanan perpustakaan}}{\sum \text{masyarakat yang mendapat layanan perpustakaan}} \times 100\%$	
	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu	$\frac{\sum \text{capaian kinerja pelaksanaan anggaran}}{\sum \text{target kinerja pelaksanaan anggaran}} \times 100\%$	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN-KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\Sigma \text{Opini positif terhadap pemberitaan kinerja}}{\Sigma \text{pemberitaan kinerja}} \times 100\%$	
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\Sigma \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100$	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2021 - 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY